



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2024



**Jl. Jend. A. Yani No.09, Prabu Jaya,
Kec. Prabumulih Timur., Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan 31113**



SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Sekretariat KPU Kota Prabumulih juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kota Prabumulih melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih, serta menjadikan KPU Kota Prabumulih sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kinerja



SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Sekretariat KPU Kota Prabumulih diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU Kota Prabumulih memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kota Prabumulih lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Prabumulih, 16 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih

Sekretaris



Yasrin Abidin
Yasrin Abidin



SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat ratusan satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggungjawab Sekretariat KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level KPPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Prabumulih disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Prabumulih kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU beserta jajarannya melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

Sekretariat KPU Kota Prabumulih berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu



SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.





SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1. Anggota KPU Kota Prabumulih	3
2. Sekretariat KPU Kota Prabumulih	6
D. Sistematika Penulisan LK.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Sasaran RPJMN 2020-2025.....	15
B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	20
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024.....	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	35



SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

BAB IV PENUTUP	49
A. Kualitas Capaian Kinerja	49
B. Hambatan Kualitas Kinerja	49
C. Upaya Mengatasi Hambatan Kinerja	53
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja	57
E. Kesimpulan.....	58

LAMPIRAN





LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat KPU Kota Prabumulih merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, KPU Kota Prabumulih berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Prabumulih dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah :



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, SAKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (Operational Plan).
2. Rencana Kinerja (Performance Plan)
3. Rencana Anggaran (Financial Plan)
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum susunan organisasi Satker KPU Kota Prabumulih dibagi menjadi dua (2) yakni Anggota/Komisioner dan Sekretariat. Untuk lebih jelasnya dielaborasi sebagai berikut:

1. Anggota KPU Kota Prabumulih

Anggota KPU Kota Prabumulih berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan keanggotaan KPU Kota Prabumulih yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Prabumulih memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pembagian koordinator wilayah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Tingkat kerawanan; dan
- Daerah terpencil dan tidak terpencil.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Pembagian divisi Anggota KPU Kota Prabumulih meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Prabumulih; dan
 - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Sosialisasi kepemiluan;
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - Publikasi dan kehumasan;
 - Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - Kerja sama antar lembaga;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
 - Menjabarkan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye; dan
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Prabumulih.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Prabumulih;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Tabel 1
Pembagian Jabatan dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Jabatan	Korwil Kecamatan
1	Marta Dinata	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Prabumulih Selatan dan Rambang Kapak Tengah
2	Resa Amilia	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,	Prabumulih Barat



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		dan Sumber Daya Manusia	
3	Vini Nurtawilia	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Prabumulih Utara
4	Marjuansyah	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Prabumulih Timur
5	Agus Salim	Divisi Hukum dan Pengawasan	Cambai

2. Sekretariat KPU Kota Prabumulih

Berikut tugas, fungsi, wewenang, dan pembagian Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Prabumulih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. Tanggung Jawab

- Sekretaris KPU Kota Prabumulih secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Prabumulih;
- Sekretariat KPU Kota Prabumulih dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota Prabumulih.

2. Tugas Sekretariat KPU Kota Prabumulih

- membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- memberikan dukungan teknis administratif;
- membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Pemilu;
- membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- membantu perumusan dan penyusunan Rancangan keputusan KPU Kota Prabumulih;
- membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Prabumulih; dan



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi Sekretariat KPU Kota Prabumulih
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Prabumulih;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Prabumulih;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Prabumulih dan Sekretariat KPU Kota Prabumulih;
 - d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Keputusan KPU Kota Prabumulih;
 - e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Prabumulih; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Prabumulih.
4. Wewenang Sekretariat KPU Kota Prabumulih
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satker KPU Kota Prabumulih mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Subbagian dan 2 (dua) pejabat fungsional, yaitu sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Prabumulih.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Prabumulih.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Prabumulih.
4. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas
Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas mempunyai tugas pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat di lingkungan KPU Kota Prabumulih.
5. Pejabat fungsional yakni Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dan Pranata Keuangan Penyelia.

Tabel 2
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satker KPU Kota Prabumulih

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan	Diklat
1	Yasrin Abidin	Sekretaris	Pembina/ IV.a	S1	Penyidik PNS dan Penyelesaian PHPU
2	Abdul Aziz	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina / IV.a	S2	Pengadaan Barang dan Jasa
3	Yudi Priambodo	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum	Penata TK I / III d	S1	
4	Iis Sugianti	Kasubbag	Penata TK I	S1	



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		Keuangan, Umum dan Logistik	/ III d		
5	Medial Aryansie	Kasubbag SDM dan Parmas	Penata TK I / III d	S1	
6	Syahrul Arifin	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Penata TK I / III d	S1	Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelatihan Akuntansi Pemerintahan
7	Totok Hartoko	Pranata Keuangan Penyelia	Penata TK I / III d	S1	Sertifikasi Perbendaharaan
8	Nizar Patriot	Staf	Penata TK I / III d	S1	
9	Sri Dewi Komala Sari	Staf	Penata TK I / III d	S1	
10	Hendri	Staf	Penata TK I / III d	S1	
11	Vemi Prima Tira	Staf	Penata TK I / III d	S1	
12	Almei Satrian	Staf	Penata / III c	S1	
13	Fedry Hasani	Staf	Pengatur TK I / II d	SMA	
14	Meilisa Nurhayati	Staf	Pengatur TK I / II d	D3	
15	Rio Sisworo	PPPK			
16	Rian Sahputra	PPPK			
17	Fahmi Junianto	PPPK			
18	Jomi Supriadi	PPPK			

Tabel 3
PPNPN Sekretariat KPU Kota Prabumulih

No	Nama Pegawai	Formasi	Pendidikan
1	Amir Mahmud	Satuan Pengamanan	SMA
2	Dodi Septarida	Satuan Pengamanan	SMA
3	Dodiansyah AR	Satuan Pengamanan	SMA
4	Yusuf	Pramubakti	SMA
5	Rahman Bakas Triansyah	Tenaga Administrasi	SMA
6	Sella Aryanti	Operasional Teknis	S1
7	Amirah Naurah D	Tenaga Administrasi	SMA
8	Rachmawati Devi Enjelina	Tenaga Administrasi	D3
9	Amir Mahmud	Driver	SMA
10	Hamzah Khairul Umam	Pramubakti	SMA



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran.
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.

D. Sistematika Pelaporan LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PP ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari sistem AKIP bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kota Prabumulih. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Komisi



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2024, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih selama tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategik yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir tahun 2024.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Prabumulih 2024

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024





LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2025, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75% pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang aman, adil, dan demokratis pada tahun, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71, dan terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2024;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2024.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karenanya semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih bersinergi atau mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Pusat tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih telah menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kota Prabumulih yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kota Prabumulih yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Prabumulih yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan :

1. terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kota Prabumulih telah melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

C. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Sekretariat KPU Kota Prabumulih dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra KPU Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 Rencana Kinerja tersebut tertuang dalam Target Kinerja Tahunan yang tercantum sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu/Pemilihan	90%
2.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100%
		Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal	100%
		Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal	100%
		Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal	100%
3.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	95%
		Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95%
		Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat waktu	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100%
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100%



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

		Persentase pelaporan logistik Pemilu/Pemilihan ke KPU Provinsi Sumsel	95%
		Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik	95%
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95%
		Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90%
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%
7.	Persiapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	100%
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	95%
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
8.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	90%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik	85%
9	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dalam Revisi Renstra Sekretariat KPU Kota Prabumulih 2020-2024, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	95%
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	95%
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu/Pemilihan	90%

2. Pembentukan Badan Adhoc (6867)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100%
Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal	100%
Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal	100%
Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal	100%

3. Masa Kampanye Pemilu (6870)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	95%
Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat waktu	100%
Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100%

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100%
Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel	95%
Persentase pendokumentasian logistik Pemilu/Pemilihan dengan baik	95%

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	90%
Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95%
Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

6. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%

7. Penetapan Hasil Pemilu (6982)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase persiapan logistik dan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%

8. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90%
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	95%
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

9. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95%
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi	100%
Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80%
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	90%
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik	85%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

10. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase Tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan	100%





LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024

Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Prabumulih secara menyeluruh.

Sekretariat KPU Kota Prabumulih telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)			
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	95	95	100
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	95	95	100



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu/Pemilihan	90	85	94,44
Sasaran 2. Pembentukan Badan Adhoc (6867)			
Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100	100	100
Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal	100	100	100
Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal	100	100	100
Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal	100	100	100
Sasaran 3. Masa Kampanye Pemilu (6870)			
Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	95	95	100
Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95	95	100
Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat waktu	100	100	100
Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100	100	100
Sasaran 4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)			
Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100	100	100
Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100	100	100
Persentase pelaporan logistik Pemilu/Pemilihan ke KPU Provinsi Sumsel	95	95	100
Persentase pendokumentasian logistik Pemilu/Pemilihan dengan baik	95	95	100
Sasaran 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)			

**LAPORAN KINERJA****SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	90	90	100
Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95	90	94,73
Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90	90	100
Sasaran 6. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			
Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100	100	0
Sasaran 7. Penetapan Hasil Pemilu			
Persentase Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	100	100	100
Sasaran 8. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)			
Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90	90	100
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	95	95	100
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100	100	100
Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95	95	100
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95	95	100
Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100	100	100
Sasaran 9. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)			
Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95	95	100



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95	95	100
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi	100	100	100
Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80	75	93,75
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	90	100
Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100	100	100
Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	90	90	100
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90	90	100
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	90	100
Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik	85	85	100
Sasaran 10. Teknis Penyelenggaraan Pemilihan (6639)			
Persentase Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan	100	100	100

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kota Prabumulih secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Sasaran 1 : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu						
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	95	95	100	551.587.000	496.589.508	90,03
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu						

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target yakni 100%, dan realisasi anggaran sebesar 90,03%.

Dalam hal ini Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi telah melaksanakan beberapa agenda diantaranya revisi anggaran, pencermatan anggaran, rencana penarikan dana, realisasi anggaran, dan revisi halaman 3 DIPA.

Subbagian Hukum dan SDM telah melaksanakan beberapa agenda diantaranya pembuatan Keputusan, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Berita Acara, surat dinas, template kegiatan pelantikan, bimtek dan TOT.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Sasaran 2 : Pembentukan Badan Adhoc (6867)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100	100	100	11.134.042.000	11.097.951.116	99,68
	Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal						
	Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal						
	Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal						

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target, dimana realisasi anggaran sebesar 99,68%. Hal ini berarti KPU Kota Prabumulih melaksanakan pembentukan badan adhoc tepat waktu.

Dalam hal ini, Subbagian SDM dan Parmas melaksanakan pembentukan badan adhoc PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dengan sukses. Demikian juga kegiatan Pengganti Antar Waktu penyelenggara adhoc selama tahun 2024.

Sasaran 3 : Masa Kampanye Pemilu (6870)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	100	100	100	201.502.000	198.906.501	98,71



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye							
Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu							
Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu							

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target, dengan catatan realisasi anggaran sebesar 98,71%.

Dalam hal ini Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum melaksanakan beberapa agenda diantaranya :

- rakor kampanye
- konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan
- pembuatan akun bagi parpol untuk SIKADEKA
- penyusunan lokasi kampanye
- penyusunan jadwal kampanye
- penyusunan pelaporan dana kampanye, dan
- fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK).



Sasaran 4 : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase logistik yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan jadwal.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan	100	100	100	1.205.256.000	1.200.904.262	99,64



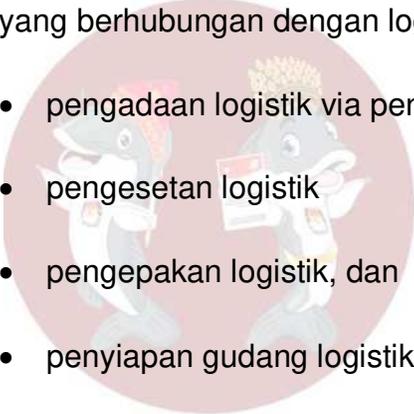
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

	sesuai prosedur						
	Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran						
	Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel						
	Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik						

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 99,64%. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target. Pada tahun 2024 sudah ada beberapa tahapan pengadaan dan pengelolaan logistik, sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dalam hal ini Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik melakukan kegiatan yang berhubungan dengan logistik diantaranya :

- pengadaan logistik via pengadaan langsung dan e-katalog
- pengesetan logistik
- pengepakan logistik, dan
- penyiapan gudang logistik.



Sasaran 5 : Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase pemungutan dan penghitungan suara termasuk simulasi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan jadwal.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase sosialisasi dan	100	100	100	1.748.912.000	1.746.467.098	99,86



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu							
Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara							
Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana							

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 99,86%. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target. Pada tahun 2024 sudah ada beberapa tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, dimana KPU telah melaksanakan rakor dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini Subbagian Teknis Pemilu dan Parhumas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara diantaranya :

- sosialisasi tungsur
- simulasi tungsur
- bimbingan teknis tungsur, dan
- penggunaan SIREKAP.



Sasaran 6 : Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Fasilitasi	100	100	100	4.000	0	0



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Penyiapan Sumpah Janji							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa sasaran ini tidak dilaksanakan karena bukan menjadi ranah KPU Kota Prabumulih sehingga tidak ada realisasi baik kegiatan maupun anggaran.

Sasaran 7 : Penetapan Hasil Pemilu (6982)

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	100	100	100	5.304.000	5.295.000	99,83

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target, dimana realisasi anggaran sebesar 99,83%.

Sasaran 8 : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik negara :

1. Opini BPK atas laporan keuangan KPU

Sekretariat KPU berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 maupun Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun sebelumnya adalah Laporan Keuangan KPU yang telah mendapatkan Opini BPK RI WTP. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa Opini BPK RI pada Tahun 2024 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU

Sekretariat KPU Kota Prabumulih sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kota Prabumulih selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun sebelumnya sudah diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Prabumulih tahun sebelumnya memperoleh nilai sebesar 71,2 dengan konversi nilai BB. Diprediksi nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Prabumulih akan sama yakni BB.

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU Kota Prabumulih pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. KPU pada tahun 2024 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU Kota Prabumulih.

- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU Kota Prabumulih telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;
- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU;
- d. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kota Prabumulih telah berupaya untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Prabumulih diantaranya :

- a. KPU Kota Prabumulih telah memanfaatkan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Monev. Aplikasi E-Monev bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk menginput capaian dan realisasi anggaran yang telah masing-masing Satker. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;
- b. Pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu begitu juga dengan adanya pemeriksaan baik oleh Inspektorat KPU RI, BPKP Provinsi Sumatera Selatan maupun BPK.



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100	100	100	2.918.182.000	2.938.071.462	100,68
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan						
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid						
	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan						
	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu						

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan melebihi target, dimana anggarannya terserap 100,68%.

Dalam hal ini, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik melaksanakan beberapa agenda diantaranya :

- Pembayaran gaji dan tunjangan
- Uang kehormatan
- Penyusunan laporan keuangan, dan
- Belanja perjalanan dinas.



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Sasaran 9 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95	95	100	187.416.000	186.828.871	99,69
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara						
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi						
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat						
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik						
	Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK						
	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja						
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan						
	Persentase						



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

	fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik						
	Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik						

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target, dimana realisasi anggaran sebesar 99,69%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Dalam hal ini penggunaan anggaran oleh semua Subbagian terkait operasional dan layanan perkantoran yang dapat menunjang penyelenggaraan perkantoran dan kepemiluan di Kota Prabumulih.

Sasaran 10 : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase KPU Kota Prabumulih yang memutakhirkan data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan	100	100	100	23.708.898.000	23.708.898.000	100

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan memenuhi target, dimana realisasi anggaran sebesar 100%.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Sekretariat KPU Kota Prabumulih telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih. Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena materi LK Sekretariat KPU Kota Prabumulih yang disajikan berisikan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Tujuan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 merujuk Renstra KPU 2020-2024 yang diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra, yang sekaligus juga sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2024. Dari kebijakan yang dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja, didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,42%. Hasil ini berarti Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

termasuk dalam kategori “Berhasil” sesuai dengan skala pengukuran yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Secara umum, Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kota Prabumulih tahun 2024 sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, faktor diluar kendali yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan, dan kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Disamping itu ada beberapa kendala lain khususnya dalam penyusunan LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2024 yakni belum adanya juknis dari KPU RI yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LK ini yang merupakan bagian dari SAKIP. Sehingga dalam hal ini disarankan solusi kepada KPU RI selaku Eselon I untuk mengeluarkan SE ataupun PKPU tentang SAKIP yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra, RKT, PK, LK dan Evaluasi LK.

Diharapkan penyusunan LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2024, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kota Prabumulih menyusun LK Sekretariat KPU dan PK Sekretariat KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

A. Kualitas Capaian Kinerja

Selama kurun waktu 2024, KPU Kota Prabumulih disibukkan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Hal tersebut menuntut semua yang berada di Satker KPU Kota Prabumulih untuk berkonsentrasi menjalankan setiap tahapan Pemilu Tahun 2024. KPU Kota Prabumulih telah memenuhi target kualitas capaian kinerja dimana aspek atau kegiatan telah tuntas dilaksanakan diiringi alokasi anggaran yang sangat memadai. Terlebih mengenai anggaran yang direalisasikan sebesar mencapai 99,42%. Ini menunjukkan anggaran hampir terserap sempurna dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 diantaranya pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, pembentukan badan adhoc, dan pemungutan dan penghitungan suara.

B. Hambatan Kualitas Kinerja

Sudah menjadi keniscayaan bahwa hambatan akan selalu menghantui dalam rangka peningkatan kualitas kinerja. Secara garis besar hambatan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam table berikut :

No	Kegiatan/Aspek	Hambatan	Keterangan
1	Kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	Terkadang jadwal audiensi atau koordinasi dengan dinas/instansi terkait mengalami perubahan dikarenakan kegiatan yang urgen atau adanya agenda yang tidak dapat digeser	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Prabumulih
2	Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Keputusan KPU Kota Prabumulih harus menunggu regulasi atau instruksi dari KPU RI atau KPU Provinsi Sumatera Selatan	Regulasi terkait tahapan Pemilu dan operasional perkantoran
3	Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	Aplikasi SIPOL	Maintenance,



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

	dipublikasikan pada publik	mengalami maintenance, admin/LO parpol yang belum mengupdate data parpol ke aplikasi SIPOL, dan warga yang belum mengetahui cara memeriksa apakah masuk anggota parpol atau tidak	update versi, dan error
4	Nilai akuntabilitas kinerja	Belum lengkapnya evidence yang dikirim pada LKE-SAKIP, bimtek atau rakor yang masih terbatas terkait pengisian LKE-SAKIP, dan kurangnya pemahaman masing-masing Subbagian dalam pemenuhan evidence LKE-SAKIP	Capaian tahun 2023 memperoleh nilai 71,2 dengan predikat B, diharapkan tahun 2024 memperoleh nilai diatas 70 dengan predikat B sehingga memberikan kontribusi LKE-SAKIP KPU secara keseluruhan
5	Opini BPK dan LHP	LPJ Badan Adhoc tidak disampaikan tepat waktu, nota pembelian yang belum dicap, keliru pencatatan keuangan	Target WTP
6	Nilai keterbukaan informasi publik	Tidak semua warga mengakses e-PPID	Target diatas 90



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		dan medsos KPU Kota Prabumulih, masih banyak yang datang langsung ke kantor dalam permintaan data	
7	Kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	Belum secara massif ke semua segmen karena padatnya jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Pendidikan pemilih lebih banyak dilakukan dalam wujud Sekolah Demokrasi dan P5 dari pihak SMP/SMA
8	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	Belum banyaknya kunjungan ke RPP terkait pengetahuan Kepemiluan	Sarana prasarana masih diperlukan update
9	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Masih ada warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Target dibawah 1%
10	KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Adanya tahapan tertentu yang mengharuskan standby sampai jam 23.59 seperti layanan pindah memilih H-30 dan H-7, dan	Berlaku untuk KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS, dan KPPS
11	KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Adanya gesekan antara PPK dengan Panwascam, PPS dengan PKD, dan KPU Kota Prabumulih	Perbedaan pemahaman regulasi

**LAPORAN KINERJA****SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

		dengan Bawaslu Kota Prabumulih	
12	Sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Tidak ada gugatan atau sengketa hukum di tahun 2024	Nihil
13	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Adanya revisi baik POK KPU Kota Prabumulih maupun revisi DJA oleh KPU RI	Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar terkait revisi anggaran
14	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Warga merasa tidak pernah menjadi anggota parpol tertentu, tidak lengkapnya data bacalon legislatif, verifikasi tidak dilakukan metode sampling	Pencatutan data warga sebagai anggota parpol, dan kewajiban verifikasi keanggotaan secara menyeluruh
15	Pembentukan Adhoc Badan	Terjadinya PAW baik PPK, PPS maupun KPPS, dan tidak lengkapnya data pendaftaran badan adhoc	Proses membutuhkan serangkaian kegiatan mulai dari klarifikasi, pemanggilan calon PAW, dan pelantikan
16	Masa Kampanye Pemilu	Banyak parpol dan calon yang memasang APK bukan di tempat yang diperbolehkan	Pemasangan APK di pohon dan menghalangi jalan
17	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Pengadaan yang kurang dari KPU Provinsi sering terlambat	Pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan seperti plano dan



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		memenuhannya, kekeliruan jumlah logistik, belum menginput dalam aplikasi SILOG	formulir
18	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Simulasi yang kurang selama tahun 2024	Minimnya anggaran untuk simulasi
19	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pengelolaan laporan keuangan terkendala belum terinput dalam SAKTI, dan barang ke SIMAK BMN	SAKTI dan SIMAK BMN
20	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Pemeliharaan kendaraan bermotor yang masih perlu ditambah	Adanya kendaraan yang berumur diatas 10 tahun baik motor maupun mobil
21	Pengelolaan Data dan Informasi	Aplikasi terkendala jaringan error atau adanya maintenance	Listrik padam dan update aplikasi

C. Upaya Mengatasi Hambatan Kinerja

Beberapa langkah yang ditempuh KPU Kota Prabumulih untuk mengatasi hambatan kinerja diantaranya :

No	Hambatan	Upaya Nyata
1	Terkadang jadwal audiensi atau koordinasi dengan dinas/instansi terkait mengalami perubahan dikarenakan kegiatan yang urgen atau adanya agenda yang tidak dapat digeser	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Prabumulih, Forkopimda, Bawaslu, PPK, PPS, KPU Provinsi, KPU RI dalam bentuk audiensi, FGD, dan zoom meeting



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

2	Keputusan KPU Kota Prabumulih harus menunggu regulasi atau instruksi dari KPU RI atau KPU Provinsi Sumatera Selatan	Berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait regulasi tahapan Pemilu dan operasional perkantoran baik tatap muka maupun via WA dan zoom meeting
3	Aplikasi SIPOL mengalami maintenance, admin/LO parpol yang belum mengupdate data parpol ke aplikasi SIPOL, dan warga yang belum mengetahui cara memeriksa apakah masuk anggota parpol atau tidak	<ul style="list-style-type: none">• Meminta petunjuk dari operator SIPOL KPU Provinsi Sumatera terkait permasalahan penggunaan aplikasi SIPOL• Mensosialisasikan melalui media sosial KPU Kota Prabumulih• Memandu secara langsung bagi warga yang melapor ke kantor KPU Kota Prabumulih
4	Belum lengkapnya evidence yang dikirim pada LKE-SAKIP, bimtek atau rakor yang masih terbatas terkait pengisian LKE-SAKIP, dan kurangnya pemahaman masing-masing Subbagian dalam pemenuhan evidence LKE-SAKIP	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaiki bukti dukung/evidence yang belum lengkap berkaca dari tahun 2023 sehingga diharapkan tahun 2024 memperoleh nilai diatas 70 dengan predikat B dan memberikan kontribusi LKE-SAKIP KPU secara keseluruhan• Melakukan evaluasi penyusunan LKE-SAKIP dengan melakukan rapat pleno dan upaya perbaikan masing-masing Subbagian
5	LPJ Badan Adhoc tidak disampaikan tepat waktu, nota pembelian yang belum dicap, keliru pencatatan keuangan	Memberikan bimtek dan jemput bola ke Sekretariat PPK atau PPS yang mengalami kendala dalam penyusunan LPJ atau bahkan keterlambatan pengumpulannya ke KPU Kota Prabumulih
6	Tidak semua warga mengakses e-PPID dan medsos KPU Kota Prabumulih, masih banyak	Aktif menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan bahwa informasi Kepemiluan sudah dapat diakses melalui e-PPID atau website, instagram, tiktok,



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

	yang datang langsung ke kantor dalam permintaan data	facebook, youtube KPU Kota Prabumulih
7	Belum secara massif ke semua segmen karena padatnya jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan pemilih dilakukan dalam wujud Sekolah Demokrasi, P5 tingkat SMP/SMA, dan Pemilihan Ketua OSIS menggunakan e-voting• Menggunakan podcast KPU Kota Prabumulih dalam memberikan materi pendidikan pemilih
8	Belum banyaknya kunjungan ke RPP terkait pengetahuan Kepemiluan	Perbaikan dan penambahan sarana prasarana RPP seperti meubelair, infokus, dan penambahan koleksi buku Kepemiluan
9	Masih ada warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan Pantarlih telah mendata dengan benar sehingga pemilih di wilayahnya terdaftar sejak DPS• Melibatkan PPK dan PPS dalam menyisir warga yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024• Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Prabumulih terkait data warga 17 tahun pada hari H pemungutan
10	Adanya tahapan tertentu yang mengharuskan standby sampai jam 23.59 seperti pencalonan dan layanan pindah memilih H-30 dan H-7, dan	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan stamina dengan mengkonsumsi multivitamin• Memprioritaskan laki-laki untuk standby dibandingkan perempuan• Membagi shift pagi dan siang untuk perempuan, dan malam untuk laki-laki



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

11	Adanya gesekan antara PPK dengan Panwascam, PPS dengan PKD, dan KPU Kota Prabumulih dengan Bawaslu Kota Prabumulih	FGD dan rakor dengan Bawaslu beserta jajarannya untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait data yang dapat diberikan dan mana data yang tidak dapat diberikan seperti by name by NIK by address di DPS, DPSHP, dan DPT
12	Tidak ada gugatan atau sengketa hukum di tahun 2023	Mempertahankan suasana kondusif yang selama ini terjaga baik
13	Adanya revisi baik POK KPU Kota Prabumulih maupun revisi DJA oleh KPU RI	Segera melakukan revisi POK sebelum dan sesudah KPU RI melakukan revisi pusat
14	Warga merasa tidak pernah menjadi anggota parpol tertentu, tidak lengkapnya data bacalon legislative, verifikasi tidak dilakukan metode sampling	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi Surat Klarifikasi bukan anggota parpol,• melakukan verifikasi keanggotaan dengan sungguh-sungguh door to door
15	Terjadinya PAW baik PPK, PPS maupun KPPS, dan tidak lengkapnya data pendaftaran badan adhoc	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan proses klarifikasi, pemanggilan calon PAW, dan pelantikan/pengambilan sumpah• Memastikan bahwa PAW nantinya akan menyelesaikan sampai akhir masa jabatan sehingga tidak akan terjadi PAW kembali
16	Banyak parpol dan calon yang memasang APK bukan di tempat yang diperbolehkan	Bekoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol-PP terkait APK yang melanggar ketentuan
17	Pengadaan yang kurang dari KPU Provinsi sering terlambat pemenuhannya, kekeliruan jumlah logistik, belum menginput dalam aplikasi SILOG	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengadaan logistik Pemilu yang dapat dilakukan pemenuhannya oleh KPU Kota Prabumulih seperti plano dan formulir• Membuat BA kekurangan logistik dan menginputnya ke aplikasi



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

		SILOG
18	Simulasi yang kurang selama tahun 2024	<ul style="list-style-type: none">Melakukan simulasi tungsura ke PPK, PPS sampai KPPS dan stake holder menggunakan anggaran sosialisasi
19	Pengelolaan laporan keuangan terkendala belum terinput dalam SAKTI, dan barang ke SIMAK BMN	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pelatihan mandiri terkait aplikasi SAKTI dan SIMAK BMNRegenerasi operator SAKTI dan aplikasi keuangan lainnya
20	Pemeliharaan kendaraan bermotor yang masih perlu ditambah	Mengoptimalkan kendaraan yang ada dengan perawatan berkala
21	Aplikasi terkendala jaringan error atau adanya maintenance	Menggunakan kuota internet bilamana dibutuhkan pengiriman data segera

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Melihat struktur organisasi KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, maka komposisi pegawai sudah sangat mumpuni khususnya dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sumber Daya (6M)	Efisiensi
1	Man (Manusia)	<ul style="list-style-type: none">Tiap Kasubbag minimal didampingi oleh 2 stafLatar belakang pendidikan yang mumpuni
2	Money (Uang)	Anggaran dilakukan seefisien mungkin mengikuti SBM yang berlaku
3	Material (Fisik)	Kantor KPU Kota Prabumulih sudah memadai sarana dan prasarananya
4	Machine (Teknologi)	Penggunaan aplikasi sehingga memangkas waktu pengerjaan seperti SILOG, SIDALIH, SILON, SIDAKAM, dsb
5	Method (Metode)	Metode baik itu tatap muka ataupun aplikasi



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

6	Market (Pemasaran/Promosi)	Media sosial KPU Kota Prabumulih sangat beragam dan dapat diakses masyarakat melalui channel youtube, tiktok, instagram, facebook, website, dan e-PPID
---	-------------------------------	--

E. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Prabumulih sudah semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut :

No	Aspek	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Sumber Daya Manusia	ASN bekerja sesuai tupoksi dan Subbagian masing-masing	ASN telah memahami dan menjalankan tupoksinya masing-masing
2	Penyerapan Anggaran	Serapan anggaran mencapai 98,17%	Melebihi target sebesar 95%
3	Peningkatan Nilai SAKIP	Perbaikan Data Dukung/Evidence	Target diatas 70%
4	Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu Tahun 2024	Sudah sesuai timeline yang ditetapkan
5	Operasional Perkantoran	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang	Akan diteruskan pemenuhannya di tahun-tahun berikutnya
6	Sengketa dan Gugatan Pemilu dan Pemilihan	Tidak adanya gugatan atau sengketa Pemilu dan Pemilihan tahun 2024	Nihi;



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Lampiran

Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	95	95	100	95	95	100	100	551.587.000	496.589.508	90,03
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pembentukan Badan Adhoc (6867)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100	100	100	100	100	100	100	7.421.764.000	7.397.563.413	99,67
	Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal										
	Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal										
	Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Masa Kampanye Pemilu (6870)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024	100	100	100	100	100	100	100	201.502.000	198.906.501	98,71
	Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye										
	Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu										
	Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu										



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100	100	1.205.256.000	1.200.904.262	99,64
	Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran										
	Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel										
	Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	100	100	100	100	100	100	100	1.748.912.000	1.746.467.098	99,86
	Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara										
	Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100	100	100	100	100	100	100	2.918.182.000	2.938.071.462	100,68
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan										
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun										
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95	95	100	95	95	100	100	187.416.000	186.828.871	99,69
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi										



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

**Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
(6639)**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	23.708.898.000	23.708.898.000	100

Pengucapan Sumpah/Janji (6981)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100	100	100	100	100	100	100	4.000	0	0



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Penetapan Hasil Pemilu (6982)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024			Hasil Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	100	100	100	100	100	100	100	5.304.000	5.295.000	99,83





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yasrin Abidin

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marta Dinata

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, 25 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,
KETUA**

MARTA DINATA

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS,**

YASRIN ABIDIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	90%
2.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase sosialisasi dan pengumuman pembentukan KPPS sesuai jadwal	100%
		Persentase pelantikan KPPS sesuai jadwal	100%
		Persentase Pengganti Antar Waktu Badan Adhoc sesuai jadwal	100%
		Persentase evaluasi Badan Adhoc sesuai jadwal	100%
3.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024	95%
		Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95%
		Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100%
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100%
		Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel	95%
		Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik	95%
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	90%
		Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95%
		Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90%

6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Prabumulih	95%
7.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase Penetapan Hasil Pemilu sesuai regulasi dan tepat waktu	100%
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	95%
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
9.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	90%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90%

	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik	85%
	Persentase Penginputan Administrasi Kepegawaian ASN Sekretariat KPU Kota Prabumulih sesuai regulasi dan tepat waktu	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
3. Total Anggaran 2024

Anggaran

Rp 2.885.908.000
Rp 17.632.649.000
Rp 20.518.557.000

Prabumulih, 25 Januari 2024

SEKRETARIS,



YASRIN ABIDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz
NIP : 19830729 200902 1 004
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yasrin Abidin
NIP : 19780429 2009021 1 003
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

YASRIN ABIDIN

PIHAK PERTAMA,



ABDUL AZIZ

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	90%
		Persentase Terelesaiannya Laporan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024	100%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

	Anggaran
1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Rp 822.654.000
2. Penetapan Hasil Pemilu	Rp 18.729.000

Prabumulih, 25 Januari 2024
 SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH,
 KASUBBAG PERENCANAAN,
 DATA DAN INFORMASI



ABDUL AZIZ



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Sugianti
NIP : 19790314 200910 2 001
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Yasrin Abidin
NIP : 19780429 2009021 1 003
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

YASRIN ABIDIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase pengadaan 10upervis tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
		Persentase pendistribusian 10upervis Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran	100%
		Persentase pelaporan 10upervis Pemilu ke KPU Provinsi Sumatera Selatan	95%
		Persentase pendokumentasian 10upervis Pemilu dengan baik	95%
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	90%
		Jumlah laporan 10uperv akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	95%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	80%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4	90%

	(empat) hari kerja	
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik	85%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

		Anggaran
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp 1.565.914.000
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Rp 2.623.928.000
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 261.980.000

Prabumulih, 25 Januari 2024

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH,
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK



IIS SUGIANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidial Aryansie
NIP : 19850527 200912 1 005
Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Yasrin Abidin
NIP : 19780429 2009021 1 003
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

YASRIN ABIDIN

PIHAK PERTAMA



★ MEIDIAL ARYANSIE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	95%
		Pengelolaan JDIIH KPU Kota Prabumulih	95%
2.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase sosialisasi dan pengumuman pembentukan KPPS sesuai jadwal	100%
		Persentase pelantikan KPPS sesuai jadwal	100%
		Persentase Pengganti Antar Waktu Badan Adhoc sesuai jadwal	100%
		Persentase evaluasi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	100%
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Persentase Penginputan Administrasi Kepegawaian ASN Sekretariat KPU Kota Prabumulih sesuai regulasi dan tepat waktu	100%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

	Anggaran
1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Rp 822.654.000
2. Pembentukan Badan Adhoc	Rp 12.406.404.000
3. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 261.980.000

Prabumulih, 25 Januari 2024
 SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH,
 KASUBBAG HUKUM DAN
 SUMBER DAYA MANUSIA





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Priambodo
NIP : 19771102 200902 1 004
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Yasrin Abidin
NIP : 19780429 2009021 1 003
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

YASRIN ABIDIN



PIHAK PERTAMA

YUDI PRIAMBODO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024	95%
		Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye	95%
		Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu	100%
2.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	90%
		Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara	95%
		Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana	90%
3.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan	95%
		Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Prabumulih	95%
4.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase Penetapan Hasil Pemilu sesuai regulasi dan tepat waktu	100%

KRO (Klasifikasi Rincian Output)

	Anggaran
1. Masa Kampanye Pemilu	Rp 911.081.000
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.892.819.000
3. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 15.048.000
4. Penetapan Hasil Pemilu	Rp 18.729.000

Prabumulih, 25 Januari 2024

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH,
 SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,
 PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



YUDI PRIAMBODO